

BAB II

Penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia terhadap

Negara Republik Indonesia

2.1 Globalisasi

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Oleh karena adanya globalisasi banyak pengaruh-pengaruh yang dapat merasuki jiwa suatu negara. Namun perlu kita ketahui bahwa dampak yang diberikan oleh adanya globalisasi ini bukan hanya berdampak baik namun buruk pula yang dapat diberikannya.

Suatu Negara baik yang telah maju maupun masih berkembang terdapat banyak isu-isu kontemporer yang disajikan oleh media-media informasi. Seperti isu yang terhangat sekarang adalah penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia. semua itu disebabkan oleh adanya globalisasi. Bukan hanya itu masih banyak lagi isu—isu tentang demikian. Olehnya itu melalui makalah ini penulis berusaha menyajikan beberapa isu-isu kontemporer tentang Negara dalam era globalisasi. Salah satu isu tersebut adalah kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia.

Globalisasi, mungkin kata itu sering kita dengarkan di televisi, radio, surat kabar ataupun percakapan sehari-hari. Kata globalisasi sendiri muncul pada dekade akhir abad ke-20. Globalisasi telah menjadikan pertukaran barang dan jasa dengan mudah terjadi melewati batas-batas territorial negara. Globalisasi menjadikan dunia seperti Global Village. Dengan adanya Globalisasi, negara-negara dapat dengan mudah melakukan suatu interaksi, bahkan individu dalam suatu negara dengan individu di negara lain dapat dengan mudah melakukan suatu interaksi, baik dalam hal komunikasi, pertukaran komoditi, pertukaran informasi, dan lain lain. Hal tersebut menjadikan globalisasi sebagai arah baru bagi perkembangan negara-negara selanjutnya.

Sejak berakhirnya perang dingin, dunia dilanda oleh suatu arus perubahan yang bersifat global. Pada mulanya wujud daripada perubahan tersebut terutama sekali terlihat dalam perkembangan sistem informasi dan transportasi dengan fenomena yang mempersingkat jarak didalam hubungan antara negara atau antara wilayah, baik dalam arti ruang maupun waktu. Jelas sekali bahwa perkembangan yang demikian telah dimungkinkan oleh terjadinya kemajuan-kemajuan yang menakjubkan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Tentu saja kemajuan-kemajuan Iptek tersebut telah tercapai berkat adanya kemampuan ekonomi untuk mendukungnya Adanya keterkaitan antara kedua faktor ini menimbulkan perubahan-perubahan yang luar biasa didalam masyarakat. Sekarang ini keterbukaan semakin kuat berembus, dengan dipayungi oleh globalisasi yang berarti menjadikan segala sesuatunya global, meraksasa

menjangkau seluruh dunia, keterbukaan dan globalisasi sepertinya menjadi pasangan yang sangat ideal, tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

2.2 Penyadapan Australia terhadap Indonesia

Seperti yang telah diketahui, penyadapan merupakan sebuah tindakan yang menyimpang dari hukum. Namun di Indonesia ada beberapa kriteria penyadapan yang boleh dilakukan demi menegakan keadilan hukum. Ada lima aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyadapan, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Narkotika (BNN).

Penyadapan dapat dimungkinkan untuk tujuan-tujuan tertentu tetapi itupun harus melalui beberapa persyaratan serta izin dari pimpinan aparat penegak hukum, sebagaimana disebutkan pada Pasal 42 UU Telekomunikasi menyebutkan (ayat 1) : “Bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa internasional melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya;”

Dan ayat (2) : “Bahwa untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas :

- a. Permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
- b. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang, yang berlaku.¹

Sedangkan pada kasus penyadapan Australia terhadap Indonesia beberapa waktu lalu, jelas merupakan sebuah pelanggaran hukum internasional. Karena Australia sudah menciderai kedaulatan bangsa Indonesia. Dalam kasus Australia penyadapan ini bila mengacu pada aspek hukum jelas Australia melanggar peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yaitu UUD No. 36 tahun tentang Telekomunikasi dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun yang ada selama ini Australia selalu dalam kasus penyadapannya berlindung dengan alasan misi diplomatik asing memungkinkan untuk memperoleh kekebalan diplomatik sebagaimana diatur dalam UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Akan tetapi pemberian imunitas tersebut tidak boleh bertentangan dengan UU yang ada. Sehingga dalam hal ini, jika dugaan pelanggaran penyadapan oleh Australia melalui misi diplomatiknya telah dibuktikan, maka imunitas tersebut dapat dianggap bertentangan dengan UU yang berlaku, dalam hal ini UU Telekomunikasi dan UU ITE. Terlebih jika Australia secara sengaja bekerja sama

¹ Hendra Ruslin, "Studi kasus Penyadapan Australia Terhadap Indonesia" diakses pada 1 mei 2016 dari <http://ryuana.blogspot.com/2014/05/studi-kasus-penyadapan-australia.html>

dengan operator jaringan telekomunikasi, maka hal ini tersebut bisa ditindak secara pidana sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

Penyadapan yang dilakukan oleh Australia memberikan kerugian terhadap negara Indonesia. Terkait kasus penyadapan yang dilakukan Australia, negara tersebut dianggap telah melecehkan bangsa Indonesia dan dalam kasus nasionalisme Australia melanggar kedaulatan NKRI yang menyangkut kerahasiaan negara dan informasi negara. Disamping itu penyadapan ini juga dilakukan terhadap petinggi-petinggi negara Indonesia, dalam kasus ini, hal tersebut merupakan masalah serius apabila data atau informasi yang diperoleh disalahgunakan oleh Australia,² bisa saja Australia akan mengetahui rencana atau kebijakan luar negeri Indonesia dan dengan mudah Australia akan dapat mengontrol kebijakan-kebijakan Indonesia tersebut.

Australia sendiri, apabila tidak berupaya untuk melakukan itikad baik dengan mengakui kesalahan meminta maaf kepada Indonesia, tentu akan memberikan kerugian tersendiri juga terhadap negara tersebut, terutama persoalan hubungan Australia dengan Indonesia. Isu penyadapan muncul ketika hubungan antara Indonesia dengan Australia dalam keadaan baik-baik saja, maka bisa jadi Australia akan kehilangan hubungan kerjasama dengan Indonesia dan juga terancam kehilangan pengaruhnya di Asia terkait Indonesia adalah kunci bagi

² Berita Republika. *Pengamat Nilai Australia Harus ganti Rugi Indonesia Soal Penyadapan*, kolom nasional, terbit 21 November 2013.

Diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/11/21/mwm27t-pengamat-niliaustralia-harus-ganti-kerugian-indonesia-soal-penyadapan> pada tanggal 17 Januari 2014

masuknya pengaruh Canberra ke Asia.³ Selain itu, tindakan penyadapan Australia ini juga melanggar Hukum Internasional yang akan merugikan Negara tersebut apabila Indonesia melaporkan tindakan Australia kepada Mahkamah Internasional PBB.

Permasalahan penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia merupakan kasus penyalahgunaan kemajuan TIK dalam kancah internasional, permasalahan yang terjadi antara dua negara dapat meyebar kepada hubungan terhadap negara-negara lainnya yang akan meimicu terjadinya tendensi dalam politik internasional. Oleh karena itu, semua negara dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus mempertahankan tindakan yang akan mereka lakukan, apakah tindakan tersebut dapat merugikan pihak lain atau tidak.

Tindakan Australia yang dianggap melecehkan Indonesia tersebut mendapatkan banyak respon dari pemerintah dan rakyat Indonesia. Banyak pihak yang menuntut presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono agar bersikap tegas dalam menghadapi tindakan Australia itu. Sejauh ini upaya yang sudah dilakukan oleh presiden Indonesia dalam menanggapi permasalahan hal ini adalah dengan memanggil pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia Nadjib Riphath dalam waktu yang belum ditentukan, selain itu SBY juga mengungkapkan bahwasanya Indonesia akan mengkaji ulang hubungan bilateral yang telah tercipta

³ Berita Republika. *Australia terancam Kehilangan Pengaruh di Asia*, kolom nasional, terbit 21 November 2013. Diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/11/21/mwm1e4-australia-terancam-kehilangan-pengaruh-di-asia> pada tanggal 17 Januari 2014

antara Indonesia dengan Australia selama ini, namun SBY tidak menyebutkan rincian kerjasama bilateral yang dimaksudkan tersebut.⁴

Sementara itu dipihak Australia sendiri tidak ada tanggapan terkait isu penyadapan ini, Perdana Menteri Tony Abbot bersikeras tidak memberikan tanggapan akan masalah tersebut selain mengatakan kalau pihaknya telah membalas surat yang pernah dikirimkan SBY kepadanya menyangkut masalah penyadapan. Melihat sikap Australia yang enggan berkomentar ini, pihak Indonesia menganggap hal itu sebagai suatu sikap yang meremehkan. Dalam menanggapi hal ini, seorang Guru Besar ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto mengatakan bahwa untuk mengatasi sifat Australia yang seenaknya terhadap Indonesia ini, pemerintah Indonesia perlu bersikap lebih tegas lagi kepada negara kangguru tersebut. Langkah yang ditempuh SBY untuk memulangkan Duta Besar Indonesia dari Australia sudah merupakan jalan yang benar, akan tetapi untuk meindaklanjuti mungkin Indonesia perlu untuk mengusir diplomat-diplomat Australia yang ada di Indonesia (*dipersonna-gratakan*).⁵ Menurut Hikmahanto, *memersonna-gratakan* diplomat negara yang dianggap bersalah merupakan cara yang wajar yang dilakukan oleh negara-negara pada masa perang dingin.

⁴ Berita BBC, Indonesia 'perlu keras' kepada Australia, kolom Indonesia, terbit 19 November 2013. Diakses dari http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131119_indonesiaaussiereaction.shtml pada tanggal 17 Januari 2014

⁵ *Loc.cit*

Jika dilihat lebih jauh ke belakang. Hubungan Indonesia-Australia selalu mengalami tarik ulur dalam beberapa tahun belakangan. Perbedaan-perbedaan budaya, dan prioritas kebijakan politik dalam dan luar negeri kedua negara yang sangat mempengaruhi tarik ulur hubungan di antara kedua negara tetangga tersebut. Sejak bulan November 1995 ketegangan antara Indonesia dengan Australia sudah dimulai dengan kasus Timor Leste sebagai pemicunya. Australia dianggap sering melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Konflik Celah Timor dan penangkapan beberapa nelayan Indonesia juga menjadi bagian konflik antara dua negara bertetangga ini Pada bulan Juli 2008 ada tuduhan yang menyebut bahwa TNI dan polisi mendanai dan mempersenjatai aksi anti kemerdekaan yang melakukan aksi antikemanusiaan di Timor Leste.

Selain itu, ada pula kasus penyelundupan narkoba pada Oktober 2004 dengan tersangka Schapelle Leigh Corby di Bandara Ngurah Rai, Bali. Ia ketahuan membawa 4,2 kg mariyuana yang kemudian divonis 20 tahun penjara (2005). Melalui beberapa remisi, preiden memberikan grasi 5 tahun, meskipun memicu kontroversi (2012). Pada tahun 2004 juga rumah kediaman kedutaan Indonesia di Australia disadap, sementara Kementerian Luar Negeri Indonesia tidak melayangkan protes. Termasuk penangkapan 272 orang nelayan Indonesia pada Mei 2005 dengan tuduhan operasi penertiban di ZEE oleh Australia. Banyak rentetan hubungan yang tidak harmonis antara Indonesia dengan Australia hingga akhirnya Indonesia menarik Duta Besarnya dari Australia. Dan yang terakhir

adalah kasus penyadapan intelijen Australia terhadap petinggi negara Indonesia seperti yang dijelaskan sebelumnya.⁶

Indonesia dan Australia adalah dua negara bertetangga, sebagai negara yang berdekatan satu sama lain secara geografis, tentu negara ini saling ketergantungan dan sudah sepatutnya menjaga hubungan baik satu sama lain. Akan tetapi adakalanya negara yang bertetangga akan dihadapkan pada situasi munculnya keinginan untuk menguasai wilayah regional mereka, dan Australia sebagai negara yang ingin mendominasi hubungan antar bangsa akan melakukan segala cara. Entah menciptakan ketergantungan dengan utang, dengan bahan pangan, atau politik, termasuk dengan alat telekomunikasi atau penyadapan.⁷

Dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, penyadapan bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan peranti lunak maupun peranti keras. Menurut Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), penyadapan ponsel bisa dilakukan hanya dengan *me-remote*. Salah satu skema konvensional penyadapan ponsel adalah dengan menaruh BTS kamufase di sekitar ponsel korban. BTS (Base Transceiver Station) adalah titik akses GSM yang pada dasarnya berbasis software "Misalnya, menggunakan BTS palsu dalam bentuk koper atau dalam bentuk yang tidak terduga. Biasanya digunakan aparat hukum untuk memburu target operasinya.

⁶ Nurudin, *Ketegangan Indonesia-Australia* [online]. Diakses dari: <http://www.harianhaluan.com/index.php/opini/27944-ketegangan-indonesia-australia> pada tanggal 17 Januari 2014

⁷ *Loc.cit*

Jika BTS kamufase itu menyala, cara kerjanya sederhana. Ponsel akan mengirimkan gelombang radio menuju BTS di sekitarnya. Dan, BTS palsu juga akan menangkap gelombang radio tersebut tanpa sepengetahuan pengguna, kemudian menerima informasi percakapan di ponsel. Skema lain, melalui alat sadap yang dipasang oleh setiap operator telekomunikasi mempunyai alat perekam yang dipasangkan di dalam jaringannya.

Hal ini merupakan demi penegakan hukum dan hanya diperbolehkan membukanya apabila diminta oleh penegak hukum. Berbicara skema yang lebih canggih, penyadapan bisa dilakukan hanya dengan menggunakan peranti lunak. Praktik penyadapan oleh intelijen asing tentu sangat rapi dan rahasia, hal ini banyak yang tidak menyadarinya. Pelaku aksi intelijen bisa menyusup dengan menyewa bandwidth ke operator tertentu dengan berpura-pura menjadi penyelenggara jasa Internet (Internet Service Provider/ISP) kemudian membuka jaringan virtual ke pusat intelijen.

2.3 Gambaran mengenai kemungkinan-kemungkinan dari metode penyadapan yang dilakukan oleh Australia

1. Membangun Base Transceiver Station (BTS) palsu

Dalam metode ini, biasanya ponsel yang akan disadap sedang dalam keadaan proses mencari sinyal karena sinyal asli dari provider diganggu oleh pihak penyadap. Ketika ponsel kesulitan mencari sinyal, maka penyadap mengaktifkan BTS palsu yang sudah dirancang menyerupai BTS asli milik provider.

Ketika ponsel sudah "ditangkap" BTS palsu, maka penyadap dapat leluasa melakukan penyadapan. Tapi, teknik penyadapan melalui BTS palsu memiliki keterbatasan, karena hanya bisa menyadap panggilan keluar saja.

2. Spoofing Network (konfigurasi BTS palsu menyerupai BTS asli)

Selain menggunakan BTS palsu, para penyadap juga dapat melakukannya penyadapan dengan menggunakan jaringan tipuan. Dalam proses ini, pihak penyadap akan membuat alamat IP dari komputer yang terpercaya untuk menciptakan akses ke jaringan terbatas dan memungkinkan terjadi pertukaran paket data.

Tapi, di sisi lain spoofing network (jaringan tipuan) juga dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk menangani lalu lintas jaringan yang padat. Yaitu, pada saat lalu lintas jaringan padat dan gateway tidak dapat memvalidasi setiap paket data. Maka untuk meminimalisir kepadatan itu dapat menggunakan jaringan tipuan.

3. Penangkap jaringan International Mobile Subscriber Identity (IMSI) di ponsel

Penangkap jaringan IMSI pada dasarnya berbentuk sebuah menara ponsel palsu yang bekerja di dekat ponsel yang akan disadap. Biasanya metode ini dilakukan untuk menguping pembicaraan seseorang di ponselnya.

Alat untuk menangkap jaringan IMSI adalah Virtual Base Transceiver Station (VBTS). Alat ini mampu mencegat panggilan dari sebuah ponsel yang berada di dekat VBTS didirikan.

Teknik-teknik penyadapan di atas telah dibuktikan keampuhannya pada sebuah acara perkumpulan hacker DEFCON-18 tahun 2010 lalu. Pada saat itu, salah satu peserta mempraktikkan teknik penyadapan pada ponsel GSM berjaringan 2G.

Perlu diketahui, jaringan 2G memiliki sistem keamanan yang lebih rendah dari generasi selanjutnya 3G. Jadi, untuk meminimalisir aksi penyadapan dengan menggunakan teknik-teknik di atas, sebaiknya mulai beralih ke jaringan 3G, 3.5G, dan 4G karena memiliki sistem keamanan yang lebih sulit ditembus.

2.4 Keefektifan Kegiatan Penyadapan dalam Diplomasi

Komunikasi yang tak berimbang akan mengancam hubungan diplomasi antar negara. Sehingga praktik diplomasi dengan negara-negara tetangga sangat penting demi penegakan kedaulatan bangsa, sehingga munculah suatu kegiatan penyadapan. Kegiatan penyadapan dianggap suatu hal yang sangat efektif untuk memperoleh atau mencari informasi dari negara lain. Satu-satunya jalan untuk mengetahui informasi-informasi yang sangat dirahasiakan oleh suatu Negara. Biasanya terbatas pada informasi-informasi tertentu yang berkaitan dengan pertahanan nasional dan hubungan luar negeri (informasi militer dan diplomasi).

2.4.1 Bidang-bidang yang menjadi tujuan dari penyadapan adalah:

2.4.1.1 Operasi militer,

Yang sering dirahasiakan antara lain adalah kekuatan dan deployment pasukan, gerakan pasukan, tempat dan saat serangan yang direncanakan, taktik dan strategi, informasi mengenai perbekalan dan logistik.

Informasi yang kita miliki mengenai aktivitas-aktivitas dan kemampuan-kemampuan lawan harus dipegang kerahasiaannya agar terpelihara kemampuan sendiri untuk memprediksi aktivitas-aktivitas itu atau untuk menetralkan kemampuan-kemampuan itu. Jika lawan mengetahui bahwa kita memiliki informasi-informasi itu, ia akan mengubah rencana-rencananya atau kemampuan-kemampuannya.

2.4.1.2 Teknologi senjata

Dirahasiakan untuk memelihara keuntungan dari pendadakan (surprise) penggunaan pertama dari suatu senjata baru, untuk mencegah lawan dapat mengembangkan tindakan counter yang efektif terhadap sistem senjata baru itu, atau untuk mencegah lawan menggunakan teknologi itu terhadap penemu orisinal (dengan mengembangkan senjata serupa)

Teknologi senjata meliputi informasi ilmiah dan teknikal yang terkait dengan teknologi senjata itu. Perang Dunia I menandai permulaan periode “modern” pada waktu mana ilmu dan teknologi mempengaruhi pengembangan sistem-sistem

senjata yang jauh lebih besar ketimbang periode-periode sebelumnya. Hal itu menjadi lebih berarti lagi dalam Perang Dunia II dengan hasil gilang gemilang ilmu dan teknologi: bom atom, radar. Kemajuan teknologi militer dipengaruhi secara signifikan oleh para ilmuwan, hal mana berbeda dengan sebelumnya, sewaktu kemajuan teknologi militer itu dipengaruhi oleh engineer (teknawan) atau oleh ilmuwan yang bekerja sebagai teknawan.

Pada umumnya, informasi mengenai riset dasar (basic research) tidak dirahasiakan, kecuali jika ia merupakan suatu terobosan yang menuju kepada suatu sista yang sama sekali baru. Contoh dalam Perang Dunia II dan beberapa tahun sesudah itu riset dasar scientific mengenai energi atom (senjata nuklir).

2.4.1.3 Kegiatan diplomatik,

Kemampuan suatu bangsa untuk mencapai hasil-hasil menguntungkan dalam negosiasi dengan negara-negara lain akan sangat berkurang jika strategi bernegosiasi dan tujuan-tujuannya diketahui sebelumnya oleh negara-negara itu.

Negosiasi dengan negara asing memerlukan kehati-hatian. Keberhasilan sering terganggu dari kerahasiaan. Bahkan apalagi negosiasi selesai pembeberan penuh dari semua yang telah terjadi, tuntutan-tuntutan atau konsesi-konsesi yang mungkin telah diajukan ataupun dikontemplasi secara politis akan sangat tidak menguntungkan, oleh karena itu mungkin akan berpengaruh negatif terhadap negosiasi-negosiasi selanjutnya, atau langsung dapat menimbulkan kerugian, bahkan mungkin bahaya ataupun hal yang sama sekali tidak diinginkan.

2.4.1.4 Kegiatan intelijen,

Informasi intelijen mencakup pengumpulan informasi dan operasi tertutup. Pengumpulan informasi dapat melalui sumber-sumber terbuka dan cara-cara tertutup. Ia juga dapat menggunakan agen-agen rahasia, sumber-sumber konfidensial dan lain-lain. Dalam melakukan kegiatan-kegiatan tertutup, kerahasiaan mengenai agen-agen dan sumber-sumber, metoda-metoda dan kemampuan-kemampuan, dan tentu mengenai informasi yang diperoleh itu sendiri.

Metode-metode yang digunakan harus dirahasiakan agar lawan tidak mengetahui tingkat keberhasilannya dan dengan tidak ada dorongan baginya untuk mengembangkan berbagai tindakan lawan (countermeasures) untuk menghentungkan arus informasi.

Informasi intelijen dari negara-negara sahabat pada umumnya diklasifikasikan. Negara-negara sahabat akan berkurang kemauannya untuk berbagi informasi intelijen (intelligence information sharing) apabila mereka tahu bahwa informasi itu tidak dipegang kerahasiaannya.

2.4.1.5 Kriptologi (persandian).

Kriptologi mencakup metoda-metoda untuk mengirimkan berita-berita rahasia (menyandi dan mengirim) dan metoda-metoda untuk mengintersepsi dan membuka sandi (decode) berita-berita yang disandi.

Kriptografi sudah dipraktekkan sejak beribu tahun lalu (Mesopotamia sekitar 1500 BC, Sparta mengembangkan suatu sistem kriptografi militer pada abad 5 BC, Persia).

Informasi kriptologi harus dirahasiakan untuk mencegah lawan mengenai kemampuan kita untuk mengintersep dan membuka sandi-sandi berita-beritanya. Jika lawan mengetahui bahwa komunikasinya tidak aman, ia akan menggunakan cara lain, yang akan meminta banyak waktu untuk mengetahuinya kembali (sukses sekutu membuka sistem sandi Jerman pada Perang Dunia II telah membantu mempersingkat jalannya perang. Sukses itu tetap dirahasiakan sampai tahun 1974, sekitar 39 tahun setelah sandi Jerman dapat dibuka dan 29 tahun setelah Perang Dunia II berakhir).

2.5 Hal yang harus diperhatikan dalam hubungan politik Indonesia-

Australia

2.5.1 komunikasi Internasional

Hal lain yang perlu diperhatikan Indonesia dan Australia dalam mencegah gejolak politik antara kedua negara ini adalah sistem Komunikasi Internasionalnya, sebagai negara bertetangga Indonesia dan Australia akan selalu berhubungan satu sama lain. Komunikasi internasional berdasarkan perspektif diplomasi adalah komunikasi internasional yang dilakukan oleh kelompok kecil antara pejabat tinggi negara yang dapat digunakan untuk mencapai kesepakatan,

mengatasi salah pengertian atau pertentangan serta bertujuan untuk mengurangi konflik. Kalau Indonesia dapat menjaga sistem komunikasi mereka dengan baik, tentu permasalahan yang dapat memicu konflik antara kedua negara ini bisa diminimalisir serta menstabilkan kondisi politik internasionalnya, karena bagaimanapun Indonesia dan Australia sebagai negara bertetangga mengharuskan serangkaian kompromi tetap diupayakan diantara mereka.

Perlu bagi negara di dunia untuk menjalin sistem komunikasi internasional yang baik dengan negara lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kestabilan hubungan antara kedua negara tersebut. Apalagi bagi negara yang bertetangga yang sangat rentan dengan berbagai konflik, komunikasi internasional adalah hal yang harus diupayakan, selain untuk menjaga hubungan baik antara kedua negara ini juga dapat menjaga kestabilan politik internasional di wilayah regional mereka.

Majunya sistem komunikasi, tidak menjamin terciptanya sistem komunikasi yang baik antar negara, apabila kemajuan sistem komunikasi tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan sepihak, seperti yang terjadi pada kasus penyadapan alat telekomunikasi yang dilakukan oleh intelijen Australia terhadap pemerintah Indonesia yang mengantarkan dua negara bertetangga ini pada konflik karena Indonesia merasa Australia telah meremehkan kedaulatan Indonesia. Pertikaian antara Indonesia dan Australia ini dapat meningkatkan tendensi politik internasional terutama di kawasan Asia Pasifik apabila tidak diselesaikan dengan cara yang benar.

Tiap-tiap negara mempunyai kepentingan domestik dalam sistem internasional. Ketika memutuskan untuk berhubungan keluar (dengan negara lain), suatu negara sudah menentukan terlebih dahulu kepentingan apa yang akan mereka bawa, dan ketika masing-masing kepentingan tiap-tiap negara tersebut bertemu dalam dunia internasional maka akan munculnya aksi dan interaksi atas respon tiap-tiap kepentingan, hal inilah yang terjadi pada negara-negara dalam politik internasional

2.5.2 Politik Internasional

Dalam politik internasional negara-negara di dunia berinteraksi satu sama lain dengan cara memberikan reaksi atas respon negara lainnya. Politik internasional ini menggambarkan reaksi dan respon tiap-tiap negara dan bukan hanya sekedar aksi saja. Negara membawa kepentingan mereka masing-masing ke lingkungan eksternal dengan mengusung *power* serta tindakan mereka.⁸ Politik internasional sama halnya dengan politik domestik terdiri dari elemen-elemen kerjasama dan konflik, permintaan dan dukungan, gangguan dan pengaturan. Negara membuat perbedaan antara lawan dan kawan.⁹

Dari Tarik ulur konflik yang sudah sering terjadi antara Indonesia dengan Australia. Sejauh ini reaksi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Australia masih belum tegas, baru pada permasalahan penyadapan alat komunikasi ini pemerintah Indonesia dianggap paling tegas dalam merespon

⁸ Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani [2006] *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA hal 39

⁹ *Ibid* hal 40

aksi Australia paling tidak dalam jangka waktu 10 tahun belakangan. Reaksi keras yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menanggapi ketidaksopnan Australia ini adalah dengan memanggil pulang duta Besar Indonesia untuk Australia. Selain itu, untuk sanksi politik Indonesia juga meningkatkan resistensinya dalam bekerjasama dengan Australia, hal ini dapat dilihat dari penolakan Indonesia untuk bekerjasama dengan Australia dalam kerangka kebijakan penyelundupan manusia Australia, serta menghentikan latihan militer bersama.¹⁰

Meskipun berbagai pihak menuntut pemerintah Indonesia untuk keras dan tegas dalam menghadapi tindakan penyadapan yang dilakukan Australia untuk memberikan efek jera, akan tetapi tidak semua jalan permusuhan yang diperlihatkan Indonesia, masih ada melalui jalan diplomasi lewat program lain, perlu diketahui bahwa ada upaya non-politik dari sektor strategis lain yang ternyata masih diupayakan oleh Indonesia untuk memastikan tali kerjasama kedua negara tidak serta merta terputus meski ada ketegangan diplomatik yang dinyatakan paling buruk sepanjang 14 tahun terakhir. Di tengah seruan pemutusan hubungan diplomatik selama klarifikasi kasus tengah berjalan, Indonesia melalui Wakil Presiden Budiono menyambut peluang kerjasama baru melalui jalur pendidikan dan kebudayaan yang ditawarkan Australia, yakni dengan pembentukan Pusat Studi Australia-Indonesia di Monash University yang melibatkan 3 universitas besar di Australia yakni Australia National University,

¹⁰ Rizka F. Prabaningtya [2013] *Indonesia-Australia, Menguji Persahabatan di Tengah Konflik Penyadapan*

Monash University dan Melbourne niversity. Program ini dirancang oleh Australia untuk memperbanyak “Indonesianis” disana.¹¹

Dari kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Australia dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, dapat dilihat bahwa gejolak politik internasional antara Indonesia dengan Australia yang ditimbulkan oleh tindakan penyadapan Australia terhadap Indonesia masih dapat diselesaikan dengan jalan lain selain konflik, akan tetapi ada hal lain yang harus diwaspadai oleh Indonesia untuk kedepannya, yaitu perhatian besar Australia terhadap Indonesia, bagaimanapun sebagai negara yang bertetangga Australia berkepentingan untuk mengetahui banyak hal mengenai negara tetangganya. Sebagai negara yang berdaulat, respon Indonesia tentu tidak bisa hanya merasa tersanjung karena dianggap penting oleh negara lain. Tindakan Indonesia tidak bisa hanya sebatas tindakan reaktif setelah kecolongan informnasi, namun bisa mempersiapkan antisipasi jangka panjang dengan tidak mengabaikan dan menganggap remeh perhatian negara lain terhadap Indonesia.¹²

¹¹ *Loc.cit*

¹² *Loc.cit*